

## IDENTIFIKASI KARAKTERISTIK FISIK DAN MASYARAKAT DALAM MENGELOLA KAWASAN PERMUKIMAN SEMPADAN SUNGAI

A.N.Azizah<sup>1)</sup>, dan T.Suheri<sup>2)</sup>

Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer  
Universitas Komputer Indonesia, Jalan Dipati Ukur No. 102-116 Bandung 40132<sup>1)</sup>, dan<sup>2)</sup>  
email: [aprilliaazizah25@gmail.com](mailto:aprilliaazizah25@gmail.com)<sup>1)</sup>, [tatangpl@yahoo.com](mailto:tatangpl@yahoo.com)<sup>2)</sup>

### ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Identifikasi Karakteristik Fisik Dan Masyarakat Dalam Mengelola Kawasan Permukiman Sempadan Sungai” Berdasarkan realita permasalahan kebutuhan lahan diparkotaan hal tersebut menimbulkan tekanan pada kawasan sekitarnya, terutama pada kawasan tepi air sungai atau yang lebih umum dengan istilah sempadan sungai. Kawasan pinggir sungai menjadi sangat menarik bagi masyarakat untuk membangun tempat tinggal, faktor yang mempengaruhinya adalah faktor fisik seperti sarana dan prasarana dan faktor masyarakat seperti kondisi sosial, kondisi ekonomi, dan kebudayaan masyarakatnya. Sungai memiliki beragam potensi sumberdaya yang dapat diambil manfaatnya bagi kepentingan hidup masyarakat. Pinggir sungai sangat akomodatif bagi manusia untuk bermukim dan melakukan usaha-usaha bagi kehidupannya. Pembangunan kawasan permukiman harusnya memiliki standar atau peraturan agar kawasan permukiman tersebut menjadi kawasan permukiman yang ideal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi karakteristik fisik dan masyarakat dalam mengelola kawasan permukiman sempadan sungai di Kelurahan Neglasari disesuaikan dengan standar dan peraturan pemerintah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan deskriptif dengan menggunakan pendekatan observasi, wawancara, dan kuesioner. Sumber data dalam penelitian ini adalah aparat setempat seperti RT dan Masyarakat. Penelitian ini memiliki dua rumusan masalah yaitu membahas tentang karakteristik fisik dalam mengelola kawasan permukiman sempadan sungai dan karakteristik masyarakat dalam mengelola kawasan permukiman sempadan sungai yang perlu di sesuaikan dengan standar atau peraturan serta undang-undang yang ada. Hasil temuan dari penelitian ini didapatkan bahwa berdasarkan variabel karakteristik fisik maupun masyarakat terdapat ketidaksesuaian dengan standard an peraturan pemerintah misalkan untuk kondisi jalan yang lebarnya tidak sesuai ketentuan. Namun untuk pengaruh variabel karakteristik masyarakat hanya variabel lama tinggal, jumlah penghuni dalam rumah dan tingkat pendapatan yang mempengaruhi kondisi fisik kawasan permukiman sempadan sungai.

**Kata Kunci :** Kawasan, Karakteristik, Sempadan Sungai

## I. PENDAHULUAN

Perkembangan kota saat ini menjadi tanda bahwa kota tersebut terbangun dengan baik sesuai aturan yang berlaku atau tidak. Perkembangan kota adalah akibat logis dari proses-proses urbanisasi yang sedang terjadi. Pertambahan jumlah penduduk yang kian hari semakin pesat menyebabkan suatu kota dituntut untuk menyediakan ruang bagi masyarakat untuk pemenuhan hajat hidupnya seperti tempat tinggal maupun perdagangan dan jasa. Namun pada kenyataannya ketersediaan lahan perkotaan saat ini semakin berkurang.

Jumlah penduduk perkotaan yang tinggi dan terus meningkat dari waktu ke waktu tersebut mempunyai implikasi pada bertambah tingginya tekanan terhadap pemanfaatan ruang kota, sehingga berkurangnya ruang terbuka hijau (RTH). Dengan adanya kondisi tersebut menimbulkan semakin tinggi kepadatan bangunan dengan persebaran yang tidak beraturan. Masyarakat yang membutuhkan lahan untuk membangun tempat tinggal terkadang tidak melihat peruntukan lahan yang akan dibangunnya.

Kebutuhan tempat tinggal tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakatnya. Bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke atas akan membangun atau bertempat tinggal di pusat kota biasanya di kawasan perumahan elit yang fasilitas penunjangnya sangat lengkap. Namun bagi masyarakat berpenghasilan menengah kebawah akan membangun atau menempati lahan yang biasanya sudah padat dan terkadang di kawasan yang tergolong kumuh.

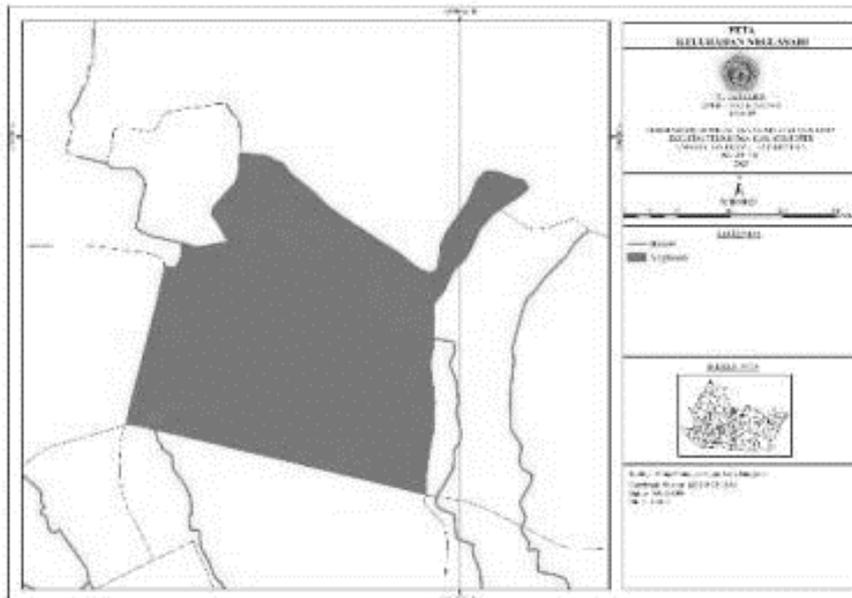
Pemanfaatan ruang terbangun terjadi karena aktivitas manusia yang menimbulkan daya tarik sehingga memunculkan aktivitas-aktivitas baru dalam memanfaatkan ruang. Berdasarkan realita tersebut menimbulkan tekanan pada kawasan sekitarnya, terutama pada kawasan tepi air sungai atau yang lebih umum dengan istilah sempadan sungai. Kawasan pinggiran sungai menjadi sangat menarik bagi masyarakat untuk membangun tempat tinggal, faktor yang mempengaruhinya adalah faktor fisik seperti sarana dan prasarana dan faktor masyarakat seperti kondisi sosial, kondisi ekonomi, dan kebudayaan masyarakatnya. Sungai memiliki beragam potensi sumberdaya yang dapat diambil manfaatnya bagi kepentingan hidup masyarakat. Pinggiran sungai sangat akomodatif bagi manusia untuk bermukim dan melakukan usaha-usaha bagi kehidupannya.

## II. METODE

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data survey, kuesioner dan wawancara untuk mengidentifikasi karakteristik fisik dan masyarakat dalam mengelola kawasan permukiman sempadan sungai di Kelurahan Neglasari. Penelitian ini berlokasi Kelurahan Neglasari Kecamatan Cibeunying Kaler yaitu kelurahan yang dilalui Sungai Cidurian.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kelurahan Neglasari Kecamatan Cibeunying Kaler yaitu kelurahan yang dilalui Sungai Cidurian. Sungai Cidurian merupakan sungai terpanjang ke-dua setelah Sungai Cikapundung, dari 46 sungai yang mengalir melintasi Kota Bandung. Dengan panjang 24,86 km lebar  $\pm 6$  m, Sungai Cidurian melintasi 16 kelurahan yang berada di Kota Bandung dan bermuara di Sungai Citarum di Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung. Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah kawasan permukiman sempadan sungai ini sudah sesuai dengan standar atau peraturan dari pemerintah yang akan diidentifikasi dari karakteristik fisik dan masyarakatnya. Salah satu karakteristik fisik tentang prasarana, sarana, dan utilitas umum contohnya membahas tentang kondisi jalan. Menurut Standar Nasional Indonesia 1733-2004 Tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perkotaan jalan lingkungan seharusnya selebar  $\pm 4$  meter yang ada dalam satuan permukiman atau lingkungan permukiman. Namun realitasnya di lingkungan kawasan permukiman Kelurahan Neglasari khususnya yang berada di sempadan sungai, lebar jalan hanya sekitar 2 meter – 3 meter saja atau hanya cukup untuk 2 motor yang melewati. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kondisi jalan terutama lebar jalan tidak sesuai dengan standar atau peraturan yang telah ditetapkan. Karakteristik fisik dan masyarakat akan diidentifikasi dan dijabarkan sesuai dengan rumusan masalah yang telah dibuat.



Gambar 1. Peta Administrasi Kelurahan Neglasari

#### A. Karakteristik Kelurahan Neglasari

##### 1) Status Kepemilikan Bangunan

Status kepemilikan tanah sangat mempengaruhi karakteristik lingkungan disekitarnya karena masyarakat dapat membangun bangunan apapun seperti bangunan untuk permukiman maupun untuk komersil. Untuk status kepemilikan bangunan dari 30 responden sebanyak 53% atau 16 responden status bangunan adalah rumah sendiri, sebanyak 37% atau 11 responden status bangunan adalah rumah orang tua, kemudian disusul rumah sewa sebanyak 7% atau 2 responden dan 3% adalah rumah kontrak atau hanya 1 responden. Hal tersebut sesuai dengan acuan Standar Nasional Indonesia yaitu, hunian tidak bertingkat adalah bangunan rumah yang bagian huniannya berada langsung di atas permukaan tanah, berupa rumah tunggal, rumah kopel dan rumah deret. Bangunan rumah dapat bertingkat dengan kepemilikan dan dihuni pihak yang sama.

##### 2) Status Kepemilikan Tanah

Berdasarkan hasil kuesioner dari 30 responden sebanyak 93% atau 28 responden status kepemilikan tanahnya adalah hak milik, dan 2 responden atau sekitar 7% tidak mengetahui status kepemilikan tanah tersebut. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria lahan untuk pembangunan permukiman berstatus hak milik pribadi.

### 3) Luas Halaman Atau Perkarangan Kosong

Hasil kuesioner dari 30 responden menyatakan bahwa sebanyak 90% atau 27 responden memiliki luas halaman atau perkarangan kosong sebesar  $< 10 \text{ m}^2$ , dan 3 responden atau sekitar 10% tidak mengetahui ukuran luasan halaman atau perkarangan kosongnya. Hal ini menyebabkan kurangnya Ruang Terbuka Hijau Perkarangan yang seharusnya sesuai dengan Perda No.05 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung dengan menyediakan Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimal 10 % (sepuluh persen) pada daerah sangat padat/ padat dan KDH ditetapkan meningkat setara dengan naiknya ketinggian bangunan dan berkurangnya kepadatan wilayah.

### 4) Jarak Tempat Tinggal Dengan Sungai

Banyaknya permukiman di sepanjang pinggir sungai disebabkan akan lahan untuk tempat tinggal semakin sulit dan susah didapatkan. Padahal pemerintah telah berupaya untuk merelokasi permukiman di sepanjang sungai. Dampak negatif dari adanya permukiman di sepanjang sungai pun banyak salah satunya mencemari ekosistem sungai. Bangunan- bangunan di sepanjang sungai terutama kota besar bisa lihat tidak memiliki jarak antar bangunan, begitu juga bangunan rumah dengan sungai. Jarak tempat tinggal di lokasi studi yang menghadap sungai rata-rata hanya sekitar 5 m – 7 m namun untuk rumah yang membelakangi sungai, dinding bangunan rumah tersebut berada diatas tembok sungai. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/Prt/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau yang menetapkan bahwa paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter.

### 5) Jarak Antar Tempat Tinggal

Dari hasil observasi langsung dapat dilihat seperti pada Gambar 4. Bangunan warga satu dengan lainnya rata-rata hampir tidak memiliki jarak sama sekali, namun ada beberapa yang dipisahkan oleh gang/jalan kecil yang lebarnya sekitar 2 m – 3 m. Bahkan pintu masuk rumah warga juga saling berhadapan langsung tanpa batas penghalang atau tidak adanya pekarangan rumah yang membatasi, hanya terpisahkan jalan sirkulasi yang sempit. Berdasarkan hasil observasi bahwa jarak antar tempat ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang menetapkan untuk permukiman perumahan, standar Garis Sempadan Bangunan yang ditetapkan dapat berkisar antara 3 meter – 5 meter.

### 6) Konstruksi Bangunan

Bangunan yang berada di pinggir sungai Cidurian untuk wilayah Kelurahan Neglasari sebagian besar atau lebih dari 67% menggunakan bangunan permanen. Bangunan yang berada di kawasan ini memiliki konstruksi yang dibangun tanpa memperhatikan kelayakan bangunan karena pembangunan dilakukan dengan perhitungan ilmu kira-kira. Namun ada juga beberapa rumah warga yang memiliki desain rumah yang berbeda dibandingkan dengan warga lain karena bentuk bangunan yang terlihat rapih. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai, ketentuan membangun bangunan dengan konstruksi permanen adalah dilarang, namun boleh dilakukan jika ada izin mendirikan bangunan yang dikeluarkan oleh wali kota atau bupati yang bahkan ada aturan tambahan yang harus dipedomani.

### 7) Kepadatan Bangunan

Kepadatan bangunan diartikan sebagai kerapatan rumah dan penggunaan penutup atap antara rumah yang satu dengan yang lainnya. Berdasarkan hasil kuesioner dari 30 responden sebanyak 83% atau 25 responden mengatakan bahwa kepadatan bangunan di lokasi studi tergolong padat, namun 5 responden atau sebanyak 17% mengatakan kepadatan bangunan tergolong sangat padat. Jumlah bangunan yang berada di Kelurahan Neglasari sebanyak 1742 bangunan. Dengan jarak antar tempat tinggal yang tidak sesuai dengan peraturan dari pemerintah maka Kelurahan Neglasari ini termasuk permukiman padat. Kelurahan memiliki luas wilayah kepadatan bangunan sekitar 47,50 Ha. 1 Hektar lahan di sempadan sungai ini memiliki 38 bangunan sehingga dikategorikan kepadatan bangunan rendah.

#### B. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum

##### 1) Sarana Peribadatan

Di Kelurahan Neglasari ini memiliki sarana ibadah masjid sebanyak 22 buah. Peneliti mengambil 2 sampel sarana peribadatan yang letaknya di pinggir sungai yaitu Masjid Miftahul Jannah dan Mushola Al-Ikhlas yang keduanya terletak di RW 08. Untuk kondisi kedua masjid tersebut sangat bersih dan rapih dikarenakan ada petugas dan penjaga masjid yang teratur membersihkan masjid tersebut. Masjid Miftahul Jannah memiliki sebuah Madrasah yaitu Madrasah Miftahul Jannah untuk murid Taman Kanak-Kanak (TK). Menurut Standar Nasional Indonesia Tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan bahwa Masjid Miftahul Jannah memiliki luasan sesuai dengan standar yaitu masjid kelurahan dengan luas lahan minimal 1.800 m<sup>2</sup>, begitu juga dengan Mushola Al-Ikhlas sesuai dengan standar musholla/langgar dengan luas lahan minimal 45 m<sup>2</sup>.

##### 2) Sarana Pendidikan

Madrasah sebagai sarana pendidikan, telah menjadi suatu kebutuhan yang nyata bagi masyarakat terutama umat muslim. Tujuan dari adanya bangunan ini yaitu memenuhi kebutuhan pembinaan rohani masyarakat terutama RW 008 Kelurahan Neglasari. Madrasah Miftahul Jannah ini diperuntukan untuk siswa PAUD Taman Kanak-Kanak dan sebagai tempat mengaji ketika sore hari untuk anak-anak di lingkungan sekitarnya sesuai Pedoman Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal Dan Informal Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 2014.

##### 3) Kondisi Jalan

Jalan yang berada di kawasan permukiman ini merupakan jalan yang berupa gang dengan lebar sekitar 2 m – 3 m. Jalan-jalan tersebut menghubungkan setiap hunian yang ada. Material yang banyak digunakan untuk jalur sirkulasi di lingkungan Kelurahan Neglasari adalah semen dan aspal. Keterbatasan lahan dengan padatnya permukiman mendorong warga melakukan kegiatan sosial di jalur sirkulasi. Jalan digunakan oleh masyarakat untuk kegiatan seperti jalur sirkulasi menuju jalan utama dari tempat tinggal, tempat berjualan pedagang keliling, tempat bermain anak-anak, untuk parkir motor, sebagai tempat menjemur pakaian, tempat meletakkan gerobak warga yang berprofesi sebagai pedagang. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia Tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan yang menyatakan bahwa jalan lingkungan harus selebar  $\pm 4$  m yang ada dalam satuan permukiman atau lingkungan perumahan.

##### 4) Sistem Jaringan Air Bersih

Semakin meningkatnya jumlah penduduk membuat kebutuhan akan air bersih pun meningkat. Meskipun ketersediaan air cukup memadai tetapi cara menyalurkan dari sumber air masih relatif terbatas sehingga belum cukup untuk pemenuhan kebutuhan air. Untuk mencapai keseimbangan antara kebutuhan air dan ketersediaan air di masa mendatang, diperlukan suatu upaya pembangunan prasarana untuk pemenuhan air baku

yang baik. Sistem jaringan air bersih pada permukiman ini menggunakan sumur gali dan jasa PDAM Kota Bandung. Berdasarkan SNI 7509 Tentang Tata Cara Perencanaan Teknik Jaringan Distribusi Dan Unit Pelayanan Sistem Penyediaan Air Minum bahwa sumber air bersih pada setiap rumah bangunan hamper semuanya menggunakan sumber air PAM. Namun, distribusi ketersediaan air PAM masih dibatasi per harinya hanya sekitar 12 jam dalam sehari air dari PAM tersebut mengalir.

#### 5) Sistem Jaringan Air Limbah

IPAL atau Instalasi Pengolahan Air Limbah merupakan sarana pengolahan limbah cair (limbah dari WC, dari air cuci atau kamar mandi). Masyarakat awan menyebut IPAL dengan sebutan septictank. IPAL biasanya dibangun secara pribadi dan biasanya untuk satu bangunan. Namun, IPAL bias juga digunakan secara komunal atau bersama-sama. Komponen IPAL Komunal terdiri dari unit pengolah limbah, jaringan perpipaan (bak kontrol & lubang perawatan) dan sambungan rumah tangga. Unit pengolah limbah ada yang terletak jauh dari lokasi warga pengguna IPAL Komunal namun ada juga yang berlokasi di lokasi permukiman warga. Air limbah atau air buangan tidak bisa dibuang begitu saja, seperti halnya limbah padat atau sampah yang juga tidak bisa dibuang sembarangan. Meskipun kelihatannya air limbah bisa langsung meresap ke dalam tanah atau mengalir di sungai, air limbah rumah tangga sebenarnya juga merupakan limbah yang merusak lingkungan hidup. Seperti yang terdapat di Kelurahan Neglasari tepatnya di RT 007 RW 002 terdapat satu IPAL Komunal yang digunakan secara bersama oleh beberapa RT setempat. Ketersediaan IPAL Komunal ini belum cukup untuk menampung buangan limbah dari rumah warga karena satu IPAL Komunal ini hanya dapat menampung maksimal 150KK sesuai dengan Buku 3 Pembangunan Infrastruktur Sanimas IDB. Sehingga buangan limbah terutama dari rumah warga yang terletak di sempadan sungai langsung dibuang ke sungai.

#### 6) Sistem Jaringan Drainase

Dalam lingkup rekayasa sipil, drainase dibatasi sebagai serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi dan/atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal sesuai dengan kepentingan. Dalam tata ruang, drainase berperan penting untuk mengatur pasokan air demi pencegahan banjir. Sistem jaringan drainase pada permukiman ini menggunakan sistem drainase tertutup yang menampung air kotor buangan dari setiap rumah. Sistem drainase yang telah diperbaiki saat ini telah sesuai dengan Buku 3 Pembangunan Infrastruktur Sanimas IDB.

#### 7) Sistem Jaringan Persampahan

Jika mengacu pada Permen PU No.21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Pengelolaan Persampahan terutama yang berkaitan dengan kebijakan pengurangan sampah sejak dari sumbernya dengan program unggulan 3R serta sasaran yang harus dicapai pada tahun 2014 sebesar 20%, pada dasarnya merupakan tugas yang berat bagi semua pihak dalam mewujudkan upaya tersebut. Mengingat kondisi yang ada saat ini, baru sekitar kurang dari 3% sampah yang dapat dikurangi atau dimanfaatkan. Kelurahan Neglasari saat ini telah mengikuti anjuran program pemerintah mengenai persampahan sehingga pengelolaan sampah di kelurahan sudah mulai terkelola dengan baik namun belum maksimal.

Kota Bandung memulai inisiatif yang sama di tahun 2018 ini. Kota Bandung meluncurkan sebuah gerakan, kolaborasi antara pemerintah, warga, swasta dan lainnya dalam membangun peradaban baru pengelolaan sampah yang lebih maju melalui upaya KANG (Kurangi) PIS (Pisahkan) MAN (Manfaatkan) Sampah. Gerakan ini adalah wujud #NyaahKaBandung yang sudah semakin bersih dan kita sedang naik level dengan gerakan #kangpisman.

#### 8) MCK Umum

Standar Nasional Indonesia 03-2399-2002 Tentang Tata Cara Perencanaan Bangunan MCK Umum, MCK Umum merupakan sarana umum yang digunakan bersama oleh beberapa keluarga untuk mandi, mencuci dan buang air dilokasi pemukiman yang berpenduduk dengan kepadatan sedang sampai tinggi (300- 500 orang/Ha). Berdasarkan pedoman tersebut dapat disimpulkan bahwa MCK Umum yang berada di Kelurahan Neglasari ini dapat melayani kurang dari 300-500 orang karena masyarakat saat ini sudah memiliki MCK sendiri dirumahnya. Namun untuk kondisi MCK Umum ini sudah tidak sesuai standar karena memang pembangunan MCK Umum tersebut dibangun pada tahun 1996 sehingga dari segi bangunan sudah kurang layak, dan lokasinya bersebelahan dengan rumah warga padahal standarnya menetapkan bahwa jarak maksimal antara lokasi MCK umum dengan rumah penduduk yang dilayani adalah 100 meter.

#### 9) Ruang Terbuka Hijau

RTH (Ruang Terbuka Hijau) adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. (UU No. 26 Tahun 2007). Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam UU No. 26 Tahun 2007 terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat. Pada Peraturan Menteri PU No. 63 Tahun 1993 dan Peraturan Pemerintah RI No. 38 Tahun 2011 (Pasal 9), sempadan sungai merupakan kawasan lindung yang seharusnya bebas dari bangunan masif. Sempadan sungai yang didominasi oleh bangunan menyebabkan daya retensi air semakin berkurang sehingga volume air limpasan menuju hilir akan semakin besar dan dapat menyebabkan banjir maupun longsor. Sehingga dibangunlah RTH berupa taman lingkungan yang diharapkan mengurangi pembangunan rumah tinggal yang semakin terus muncul.

#### C. Karakteristik Masyarakat dalam Mengelola Kawasan Permukiman Sempadan Sungai

##### 1) Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan di lokasi studi adalah SLTA sangat dominan dengan persentase 40%. Tingkat pendidikan masyarakat sempadan sungai tidak mempengaruhi kondisi fisik lingkungan permukiman karena pengetahuan akan peraturan pengelolaan sempadan sungai adalah sama antar tingkat pendidikan. Berdasarkan hasil wawancara terhadap para responden tingkat pendidikan mempengaruhi pengetahuan masyarakat terhadap pengelolaan kawasan permukiman sempadan sungai. Namun untuk tingkat partisipasi tergolong sama antara tingkat pendidikan rendah maupun tinggi. Pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan kawasan permukiman sempadan sungai yaitu dengan tidak membuang sampah ke sungai dan ikut kerja bakti membersihkan sungai. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut dilakukan sosialisasi oleh aparat setempat dan salah satunya dibuatlah taman yang dimaksudkan untuk menahan tanah dari pemakaman agar tidak terjadi longsor karena di dinding taman tersebut dibuat saluran air dari atas pemakaman. Sedangkan untuk tingkat partisipasi juga antar tingkat pendidikan sama karena jika dilakukan kegiatan kerja bakti tidak semua elemen pendidikan ikut berpartisipasi hanya segelintir saja yang mengikuti karena kesadaran sendiri.

##### 2) Mata Pencaharian

Mata pencaharian di lokasi studi di dominasi oleh pekerjaan serabutan. Mata pencaharian tidak mempengaruhi kondisi fisik lingkungan permukiman karena mata pencaharian di lokasi studi bervariasi. Berdasarkan hasil wawancara mata pencaharian Pedagang/Wiraswasta, Pegawai Swasta dan PNS mempengaruhi keterbatasan waktu dalam melakukan pengelolaan sehingga pengelolaan yang dilakukan hanya sebatas pengelolaan sampah, namun untuk mata pencaharian buruh masyarakat tersebut ikut serta dalam pembuatan RTH yaitu Taman Cidurian dan taman yang sedang dalam tahap pengerjaan dan secara sukarela membersihkan sungai dengan alasan ketersediaan waktu yang cukup banyak untuk melakukan kegiatan.

### 3) Lama Tinggal

Lama tinggal masyarakat di lokasi studi rata-rata diatas atau lebih dari 10 tahun sebanyak 20 responden atau sebanyak 67%. Lama tinggal masyarakat mempengaruhi kondisi fisik lingkungan permukiman karena status kepemilikan tanah membuat semakin padatannya bangunan di sempadan Sungai Cidurian. Berdasarkan hasil wawancara responden dengan lama tinggal rata-rata 5 Tahun – 10 Tahun dan > 10 Tahun sebanyak 18 responden dari kedua kriteria memiliki kesadaran dalam hal pengelolaan persampahan dan penyediaan RTH di tempat tinggalnya. Masyarakat tersebut memiliki tempat sampah di dalam rumahnya untuk menampung sampah sebelum diangkut oleh petugas sampah kemudian mereka juga memiliki sebuah kebun kecil yang dimaksudkan agar rumah mereka memiliki penghijauan. Namun responden yang tersisa hanya membuat pagar/tembok pembatas antara rumah dan sungai untuk yang menghadap ke sungai dan perbaikan saluran pembuangan limbah serta jalur drainase untuk rumah yang membelakangi sungai.

### 4) Jumlah Penghuni Dalam Rumah

Jumlah penghuni dalam rumah rata-rata 5 orang dengan persentase sebesar 30%. Jumlah Penghuni dalam rumah mempengaruhi konstruksi bangunan di sempadan sungai. Bangunan yang awalnya adalah semi permanen kemudian dibuat menjadi permanen seiring bertambahnya dan semakin banyaknya penghuni dalam rumah. Berdasarkan hasil wawancara responden, jumlah penghuni dalam rumah mempengaruhi kondisi fisik bangunan permukiman, semakin bertambahnya jumlah penghuni maka bangunan tempat tinggal pun perlu di renovasi agar lebih besar. Hal tersebut membuat lahan yang tersedia semakin sedikit untuk dijadikan RTH. Limbah yang dibuang ke sungai bagi rumah yang terletak di sempadan sungai dan tidak memiliki septictank pun semakin banyak dan sampah yang dihasilkan juga semakin banyak.

### 5) Tingkat Pendapatan

Tingkat pendapatan berdasarkan kuesioner ternyata untuk penghasilan utama dari 30 responden yaitu yang memiliki penghasilan kurang dari Rp.500.000,- dengan jumlah responden sebanyak 9 orang atau sebesar 30% responden. Tingkat pendapatan mempengaruhi status kepemilikan bangunan yang di dominasi adalah rumah sendiri karena terkait dengan harga lahan yang relative lebih murah di banding dengan di pusat kota. Berdasarkan hasil wawancara responden, mata pencaharian yang di dominasi oleh pekerjaan buruh membuat tingkat pendapatan mereka pun rendah yaitu < Rp.500.000,- sehingga hal yang dapat dilakukan oleh mereka dalam melakukan pengelolaan kawasan permukiman sempadan sungai yaitu dengan mengikuti sosialisasi kegiatan atau program yang diadakan seperti membersihkan sungai, berpartisipasi dalam pembuatan RTH, pembangunan IPAL Komunal, dan Pengelolaan Sampah. Namun untuk tingkat pendapatan >Rp.500.000,- rata- rata hanya mengikuti program atau kegiatan pengelolaan sampah dan kerja bakti di lingkungan permukiman.

### *D. Gambaran Umum Program Atau Kegiatan yang dilatarbelakangi oleh Karakteristik Fisik dan Masyarakat dalam Mengelola Kawasan Permukiman Sempadan Sungai Cidurian Kelurahan Neglasari*

#### 1) Program Kang Pisman

Gerakan Kang Pisman atau Gerakan Kurangi, Pisahkan dan Manfaatkan Sampah adalah langkah pengelolaan sampah di Kota Bandung. Program yang masuk dalam 100 hari pertama kepemimpinan Walikota Oded M. Danial dan Wakil Wali Kota Yana Mulyana ini diharapkan bisa merangkul seluruh elemen masyarakat secara masif. Gerakan ini adalah upaya pemerintah Kota Bandung untuk naik kelas dalam Sistem Pengelolaan Sampah dan mendukung tercapainya program Jakstranas yang menargetkan pengurangan sampah di sumber sebanyak 30 persen pada tahun 2025. Gerakan Kang PisMan akan dikemas dengan sosialisasi dan kampanye sebagai ajakan #NyaahKaBandung. Sebagai penyemangat selain sosialisasi yang masif Pemkot juga akan menyiapkan lomba-lomba yang menarik sebagai

apresiasi kepada warga Bandung yang sudah mendukung program ini. Walikota Oded M. Danial menargetkan minimal setiap bulan 1 persen warga Bandung setiap bulan melakukan aksi #BdgPisahkanSampah sejak dari rumah. Pemerintah Kota Bandung melalui Wali Kota Bandung Oded M Danial ingin merubah pola masyarakat dalam hal pengelolaan sampah. Stakeholder dalam strategi ini, melalui RT setempat memberikan sosialisasi kepada semua warga untuk menjalankan Gerakan Kang Pisman. Setiap rumah diberikan sebuah tempat sampah kecil untuk pemilahan sampah organik agar bisa di daur ulang kembali. Sehingga diharapkan tidak ada lagi yang mencampur jenis sampah. Gerakan Cidurian Bersih dan Hijau

Gerakan ini diinisiasi oleh pemerintah yang kemudian melibatkan Kelurahan, Anggota Koramil 1802/cyb dan Aparatur seperti Kelurahan, RT dan RW. Gerakan ini dilakukan ketika kondisi sungai sudah sangat kotor. Strategi yang dilakukan adalah dengan memberikan sosialisasi dan edaran ke setiap warga. Pendekatan berupa sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga area sungai untuk pemenuhan kebutuhan manusia dan bagaimana cara dalam mengelola limbah rumah tangga yang benar. Diharapkan warga yang bertempat tinggal di sepanjang pinggir sungai lebih peduli terhadap lingkungan sekitar. Program ini mempengaruhi system drainase, sistem pembuangan air limbah yang terdapat di kawasan permukiman ini karena Sungai Cidurian harus terjaga dan terpelihara kondisinya. Sehingga dibangunlah sebuah IPAL Komunal yang akan mengolah setiap pembuangan dari rumah warga, sehingga pembuangannya tidak akan mencemari sungai.

#### IV. KESIMPULAN

Karakteristik fisik dalam mengelola kawasan permukiman di sempadan Sungai Cidurian Kelurahan Neglasari berdasarkan standar atau peraturan pemerintah adalah bahwa indicator Luas Halaman Kosong atau Perkarangan Kosong sebanyak 90% memiliki luas halaman atau perkarangan kosong sebesar  $< 10 \text{ m}^2$ , Jarak tempat tinggal di lokasi studi yang menghadap sungai rata-rata hanya sekitar 5 m – 7 m namun untuk rumah yang membelakangi sungai, dinding bangunan rumah tersebut berada diatas tembok sungai, Kepadatan Bangunan di lokasi studi ini rata-rata sebanyak 83% responden mengatakan bahwa kepadatan bangunan tergolong permukiman padat, Sarana Prasarana dan Utilitas Umum yang terdapat di lokasi studi ini terdiri dari Kondisi Jalan Lingkungan, MCK Umum berdasarkan realitasnya tidak sesuai dengan standar, peraturan dan pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sedangkan untuk indicator lainnya telah sesuai dengan standar, peraturan dan pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Karakteristik Masyarakat dalam Mengelola Kawasan Permukiman Sempadan Sungai

- a. Tingkat pendidikan di lokasi studi adalah SLTA sangat dominan dengan persentase 40%. Tingkat pendidikan masyarakat sempadan sungai tidak mempengaruhi kondisi fisik lingkungan permukiman karena pengetahuan akan peraturan pengelolaan sempadan sungai adalah sama antar tingkat pendidikan.
- b. Mata pencaharian di lokasi studi di dominasi oleh pekerjaan serabutan. Mata pencaharian tidak mempengaruhi kondisi fisik lingkungan permukiman karena mata pencaharian di lokasi studi bervariasi.
- c. Lama tinggal masyarakat di lokasi studi rata-rata diatas atau lebih dari 10 tahun sebanyak 20 responden atau sebanyak 67%. Lama tinggal masyarakat mempengaruhi kondisi fisik lingkungan permukiman karena status kepemilikan tanah membuat semakin padatnya bangunan di sempadan Sungai Cidurian.
- d. Jumlah penghuni dalam rumah rata-rata 5 orang dengan persentase sebesar 30%. Jumlah Penghuni dalam rumah mempengaruhi konstruksi bangunan di sempadan sungai. Bangunan yang awalnya adalah semi permanen kemudian dibuat menjadi permanen seiring bertambahnya dan semakin banyaknya penghuni dalam rumah.

- e. Tingkat pendapatan berdasarkan kuesioner ternyata untuk penghasilan utama dari 30 responden yaitu yang memiliki penghasilan kurang dari Rp.500.000,- dengan jumlah responden sebanyak 9 orang atau sebesar 30% responden. Tingkat pendapatan mempengaruhi status kepemilikan bangunan yang di dominasi adalah rumah sendiri karena terkait dengan harga lahan yang relative lebih murah di banding dengan di pusat kota.

Program atau Kegiatan Yang Di Latar Belakang Oleh Karakteristik Fisik Dan Masyarakat Dalam Mengelola Kawasan Permukiman Sempadan Sungai Cidurian Kelurahan Neglasari. Program Kang Pisman dan juga Gerakan Cidurian Bersih dan Hijau adalah bentuk kepedulian terhadap lingkungan sekitar.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Mokodongan, B., Sela, R., & Karongkong, H. H. (2014). Identifikasi Pemanfaatan Kawasan Bantaran Sungai Dayanan di Kotamobagu. *Sabua*, 6(3), 273-283.
- [2] Yanti, F., Persada, C., & Setiawan, A. (2019, January). Kualitas Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Bandar Lampung (Studi Kasus Lapangan Merah dan Pasar Seni, Lapangan Kalpataru dan Embung Sukarame/Taman Kota). In *Prosiding Seminar Nasional ASPI 2018 (Vol. 1, No. 1, pp. 236-243)*. P4W LPPM IPB.
- [3] Susilawati, N. K., Sugiyanta, I. G., & Suawarni, N. (2018). Karakteristik Sosial Ekonomi Penduduk Yang Bermukim di Bantaran Sungai Cungkeng Kelurahan Kotakarang. *Jurnal Penelitian Geografi*, 6(1).
- [4] Prastyo, A. A., & Suheri, T. Identifikasi Pemanfaatan Ruang Terbangun Di Wilayah Pesisir Sepanjang Pantai Padang Bagian Barat, Kecamatan Padang Barat, Kecamatan Padang Utara.
- [5] Sari, N. R., & Khadiyanto, P. (2014). Kualitas Lingkungan Permukiman Di Tepi Sungai Kelurahan Pelita, Kecamatan Samarinda Ilir. *Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Kota)*, 3(4), 1002-1012.